

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara agar dapat dijalankan dengan transparan dan akuntabel menjadi isu yang sangat penting di pemerintahan Indonesia terutama pada era reformasi saat ini untuk menciptakan *good governance*. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015, reformasi keuangan negara menuntut terwujudnya reformasi di bidang akuntansi pemerintahan melalui penggunaan basis akuntansi akrual, dengan harapan perubahan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang keduanya merupakan hal yang mendasar bagi entitas organisasi dalam mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang dilakukan, baik dalam lingkup organisasi privat maupun organisasi publik. Berbagai macam tuntutan dari masyarakat yang semakin kuat dan adanya dorongan dari lembaga-lembaga internasional, seperti *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *The International Monetary Fund (IMF)* dan *World Bank*, untuk menerapkan basis akrual kepada negara-negara di dunia menyebabkan pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki sistem akuntansinya (Halim, 2012).

Hal tersebut mendorong pemerintah pada tahun 2010, melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) selaku komite yang dibentuk untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melakukan suatu kebijakan akuntansi yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Penyusunan SAP berbasis akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Menurut PP No. 71 Tahun 2010 akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

SAP ditetapkan dengan PP No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005, penyusunannya mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, laporan berbasis akrual juga mencatat jumlah utang dan piutang. Inilah alasannya mengapa laporan berbasis akrual dipercaya mampu memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan dibandingkan akuntansi berbasis kas. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik kualitatif yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual membawa dampak walau sekecil apapun. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah dalam melaksanakan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Permasalahannya yaitu terletak pada berbagai tantangan untuk dapat menerapkannya. Di Indonesia banyak sekali daerah-daerah yang masih memiliki kelemahan dalam menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, seperti yang di kutip dari penjelasan Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti (2015) mengatakan pihaknya masih terbentur beberapa masalah pokok standarisasi keuangan. Ia memaparkan, beberapa masalah yang terjadi adalah regulasi dan kebijakan terkait implementasi SAP yang sudah ada namun belum relevan, analisis kebutuhan SDM pengelola keuangan, dan sistem informasi belum memadai. Hal yang sama juga datang dari Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, Bapak Efdinal yang mengatakan, “Hasil pemeriksaan BPK RI menyimpulkan, upaya Pemprov DKI belum sepenuhnya efektif dalam mendukung kesiapan implementasi SAP berbasis akrual” Jumat (6/11/2015). Lingkup pemeriksaan mencakup komitmen, regulasi dan kebijakan, pengelolaan SDM, pengelola keuangan, aset dan sistem informasi. BPK menyoroti permasalahan dalam aspek pengelolaan SDM di Pemprov DKI Jakarta. Meski Pemprov DKI telah memiliki sistem kepegawaian berupa Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), dan telah menyusun uraian tugas atas SDM pengelola keuangan dan aset, serta menyelenggarakan diklat untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang akuntansi berbasis akrual, namun *database* kepegawaian DKI belum lengkap dan mutakhir.” ujarnya. Aspek sistem informasi

Pemprov DKI telah memiliki beberapa aplikasi pengelolaan keuangan. Namun, sistem pengelolaan keuangan tersebut belum mampu menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual dan belum terintegrasi. Belum didukung keamanan akses data dan *disaster recovery plan* serta belum tersedia SDM pengelola sistem informasi pada SKPD.

Kejaksanaan Agung menetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan Laonma Tobing sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial di Sumsel pada tahun 2013. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Amir Yanto (2017), Laonma telah terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi dana hibah di Sumsel. Laonma ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang Mantan Kepala Kesbangpol Sumsel berinisial I dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,38 miliar tersebut. Dikatakan Amir, bukti kuat yang mengarah adanya dugaan korupsi adalah pemotongan anggaran saat penyaluran dana hibah dan bansos di Sumsel tiga tahun yang lalu. Pada tahun 2013, Pemprov Sumsel mengalokasikan dana untuk hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 miliar. Namun, jumlah itu tiba-tiba meningkat hingga Rp 2,11 miliar dalam APBD Perubahan. Di mana dari jumlah itu, senilai Rp 600 juta dialokasikan untuk bansos dalam pagu APBD Perubahan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas SDM yang ada di instansi pemerintahan masih belum optimal dan juga terdapat beberapa kasus penyelewengan terhadap pembuatan laporan keuangan. Kapasitas SDM yang masih minim ini menjadi faktor penting yang memiliki pengaruh terhadap kesiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan penelitian Ni Made (2015) yang menyatakan bahwa SDM yang kurang memadai merupakan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut Ketua BPK Harry Azhar Azis, “Pembuatan laporan akuntansi akrual di pemda masih mengalami kendala terutama di kualitas SDM, masih ada yang belum mengetahui dan mengerti apa itu akrual.”(Jakarta, Aktual.com. 21 Januari 2016). Kepala perwakilan BPKP Provinsi Sumsel IGB Surya Negara (2015) juga menyatakan

bahwa SDM yang berkualitas menjadi prioritas agar akuntansi basis akrual ini dapat terlaksana.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah sarana prasarana, peningkatan layanan publik terutama dalam hal sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung kantor dan sarana mobilitas, akses online, memberikan fasilitas seperti komputer, sarana penunjang pengauditan, seperti audit elektronik dan sarana lainnya untuk menunjang penerapan laporan keuangan berbasis akrual. Ketersediaan fasilitas pendukung atau sarana fisik bagi penyelenggaraan tugas mutlak diperlukan. Kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas sangat dipengaruhi oleh kondisi ketersediaan sarana dan prasarana. Aldiani (2010) juga berpendapat ketersediaan perangkat pendukung berupa tersedianya *computer* dan *software* akan membantu SKPD dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan informasi yang berkualitas.

Faktor selanjutnya yaitu sistem informasi, dalam PP No. 56 Tahun 2005 dijelaskan tentang Sistem Informasi Akuntansi bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan sistem informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Menurut Faradillah (2013) kompleksitas dalam penerapan basis akrual membutuhkan sistem yang lebih terpadu dan didukung oleh sistem informasi yang memadai. Dalam pelaksanaan basis akrual terutama dibagian sistem informasi harus menggunakan aplikasi yang mendukung seperti sistem aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Surya Negara (2015) juga menegaskan bahwa BPKP dalam hal ini telah memberikan jalan keluar bagi Pemda dengan mengimplementasikan SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan SIMDA Pendapatan, SIMDA BMD yang telah mengadopsi PP 71 Tahun 2010.

Selain beberapa kasus di atas, ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi kesiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual berdasarkan penelitian sebelumnya seperti faktor SDM, komitmen organisasi, teknologi

informasi dan komunikasi (Gabriella Ara Adventana dan Ch.Heni Kurniawan, 2013). Kualitas SDM dan komunikasi (Ardiansyah, 2013). SDM dan sistem informasi (Mohammad Man Azwan, 2015). SDM, komitmen organisasi dan perangkat pendukung (Norfaliza, 2015). SDM, komitmen, komunikasi dan teknologi informasi (M. Luthfi Iznillah, 2015). Kualitas teknologi informasi, pengelolaan aset tetap, tingkat pelatihan, pendidikan dan latar belakang pimpinan (Ersya Resya Ranilhaj, 2016). Kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan komunikasi (Idha Purwaningrum, 2017). SDM, sistem informasi dan komitmen (Rian Fitrizal, 2017) dan lain-lain. Fokus riset pada penelitian ini yaitu pengaruh dari faktor sumber daya manusia, sistem informasi, dan sarana prasarana.

Pemerintah provinsi Sumatera Selatan termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang pada akhirnya menerapkan SAP berbasis akrual, termasuk BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan entitas pelaporan. Strategi penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap yang menyebabkan perlunya penyesuaian kembali dengan baik karena konsep akuntansi akrual di lingkungan pemerintah masih sangat baru, dan juga amanat Undang-Undang supaya pemerintah segera menggunakan SAP berbasis akrual menjadi alasan utama mengapa penelitian mengenai kesiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual perlu dilakukan. Di sisi lain, adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu dan juga fenomena yang terjadi serta banyaknya pro kontra dalam pelaksanaan basis akrual. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi Terhadap Kesiapan Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual (Studi pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap kesiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual?
2. Apakah sarana prasarana berpengaruh secara parsial terhadap kesiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual?
3. Apakah sistem informasi berpengaruh secara parsial terhadap kesiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual?
4. Apakah sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi berpengaruh secara simultan terhadap kesiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah di atas dan supaya analisis menjadi lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi terhadap kesiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini hanya mengambil objek pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh :

1. Sumber daya manusia secara parsial terhadap kesiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual.
2. Sarana prasarana secara parsial terhadap kesiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual secara parsial.
3. Sistem informasi secara parsial terhadap kesiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual.

4. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi secara simultan terhadap kesiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kesiapan pelaksanaan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sehingga informasi ini dapat digunakan dan diketahui oleh pihak yang berkepentingan seperti instansi terkait, masyarakat umum agar lebih mudah dalam memahami laporan keuangan berbasis akrual dan untuk peneliti selanjutnya, supaya lebih meningkatkan mutu dan kualitas faktor tersebut agar pemerintah semakin siap dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual dan meminimalisir terjadinya KKN.
2. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi secara simultan terhadap kesiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, sehingga informasi ini dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk lebih meningkatkan kualitas seluruh faktor tersebut serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual.